



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN 2023

DINAS KOPERAS DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN CIREBON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KOPERAS DAN USAHA MIKRO
KECIL MENENGAH
JALAN SURABAYA NO. 15 TELUK CENDIANG



KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat, hidayat dan petunjuk bagi kami, sehingga kami dapat menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

LAKIP Dinas koperasi dan UKM Tahun 2023 ini disusun sebagai pertanggungjawaban yang berisi informasi kinerja dalam upaya mendukung pelaksanaan tugas umum pemerintahan, pembinaan dan pengembangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (KUMKM) secara baik, akuntabel, efisien, responsive terhadap aspirasi yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur, guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) sehingga mendapat kepercayaan dari pemangku kepentingan (*stakeholder*).

Dengan disusunnya LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dapat dilihat hasil kinerja selama 1 (satu) tahun untuk menjadi tolok ukur keberhasilan suatu program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pembinaan dan pengembangan KUMKM di Kabupaten Cirebon.

Semoga LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 ini dapat bermanfaat sebagai bahan pertimbangan bagi instansi yang berwenang untuk mengkaji dan mengevaluasi hasil penyelenggaraan kinerja bidang Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon.

Sumber, Januari 2024

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,



Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19670410 199301 1 001





IKHTISAR EKSEKUTIF

LAKIP disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan.

Maksud disusunnya LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Adapun tujuan disusunnya LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 adalah:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada Bupati atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai.
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.





Beberapa hal pokok yang diuraikan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah sebagai berikut:

1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Tahun 2023 dan analisa hasil capaian kinerja, maka diperoleh gambaran tentang pencapaian sasaran Strategis dari pelaksanaan Program/Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023, sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas pelayanan public 90 Poin
- 2) Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan 92 Prosen
- 3) Meningkatnya kukalitas koperasi 45 Prosen
- 4) Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro 12,44 Prosen
- 5) Meningkatnya kemandirian, berdaya saing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM 10 Prosen
- 6) Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran 90 Prosen

2. Realisasi dan Anggaran

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp.6.391.839.061,00,- atau mencapai 89,75% dari alokasi anggaran sebesar Rp7.121.463.384,00,-.

3. Permasalahan dan Solusi

Berdasarkan permasalahan yang timbul dari berbagai pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 dapat dikelompokkan pada permasalahan sebagai berikut:

- 1) Lemahnya SDM dan Manajemen
- 2) Rendahnya legalitas dan kurangnya modal
- 3) Lemahnya pengolahan produksi dan pemasarannya masih sederhana
- 4) Pengemasan masih sederhana serta kurangnya inovasi.
- 5) Pengetahuan perkoperasian masih rendah sehingga perlu dilakukan sosialisasi tentang perkoperasian untuk meningkatkan minat masyarakat dan pengusaha mikro untuk dapat bergabung dalam wadah koperasi.





- 6) Banyaknya koperasi yang mati suri sehingga perlu adanya pembinaan yang berkelanjutan untuk dapat mengaktifkan kembali kegiatan berkoperasi sebagai bentuk korporasi bagi anggotanya sehingga dapat bersaing dengan bentuk usaha lainnya.

Sumber, Januari 2024

KEPALA DINAS
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN CIREBON,


Drs. H. DADANG SUHENDRA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19670410 199301 1 001





DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas dan Fungsi	3
1.3. Isu Strategis	4
1.4. Keadaan Pegawai	4
1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana.....	7
1.6. Keuangan	8
1.7. Sistematika LAKIP	10
BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PERENCANAAN KINERJA	12
2.1. Perencana Strategis.....	12
2.1.1. Visi dan Misi	12
2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran	13
2.1.3. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	14
2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	17
2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023.....	18
2.3.1 Target Belanja Dinas Koperasi dan UKM.....	18
2.3.2. Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis	19
2.4 Instrumen Pendukung	20
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	21
3.1. Capaian Kinerja.....	21
3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran.....	24
3.3. Realisasi Anggaran	26
3.2.1. Realisasi Anggaran APBD	26
3.3. Inovasi	58
BAB VI PENUTUP	59
4.1. Kesimpulan	59
4.2. Rencana Tindak Lanjut	59
LAMPIRAN	





DAFTAR TABEL

	Hal.
Tabel 1.1.1. Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.....	2
Tabel 1.4.1. Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Berdasarkan Golongan	4
Tabel 1.4.2. Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Jenjang Pendidikan	5
Tabel 1.4.3. Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.5.1. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	7
Tabel 1.6.1. Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA 2023	9
Tabel 2.1.2.1 Tujuan, Sasaran serta Indikator Sasaran	17
Tabel 2.1.3.1 Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	19
Tabel 2.2.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	21
Tabel 2.3.1.1 Target Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah APBD Murnin dan Perubahan	22
Tabel 2.3.2.1 Anggaran Daerah Per Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah TA 2023	23





DAFTAR GAMBAR

	Hal.
Gambar 1.4.1. Diagram Komposisi Pegawai Menurut Golongan	5
Gambar 1.4.2. Diagram Komposisi Pegawai menurut Jejang Pendidikan..	6
Gambar 1.4.3. Diagram Komposisi Pegawai menurut Jenis Kelamin	7





BAB I

1. PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 42, Seri D).

Tuntutan terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) khususnya menyangkut kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon harus didukung pemerintahan yang bersih dan berwibawa melalui pelayanan tepat guna/prima dan profesionalisme oleh aparat Diskopukm khususnya, agar hubungan dan mekanisme kerja antara Eksekutif dan Legislatif (DPRD) di Kabupaten Cirebon terjalin dengan harmonis dan selaras terbentuk hubungan (*check and balance*) yang lebih seimbang.

1.1 Struktur Organisasi

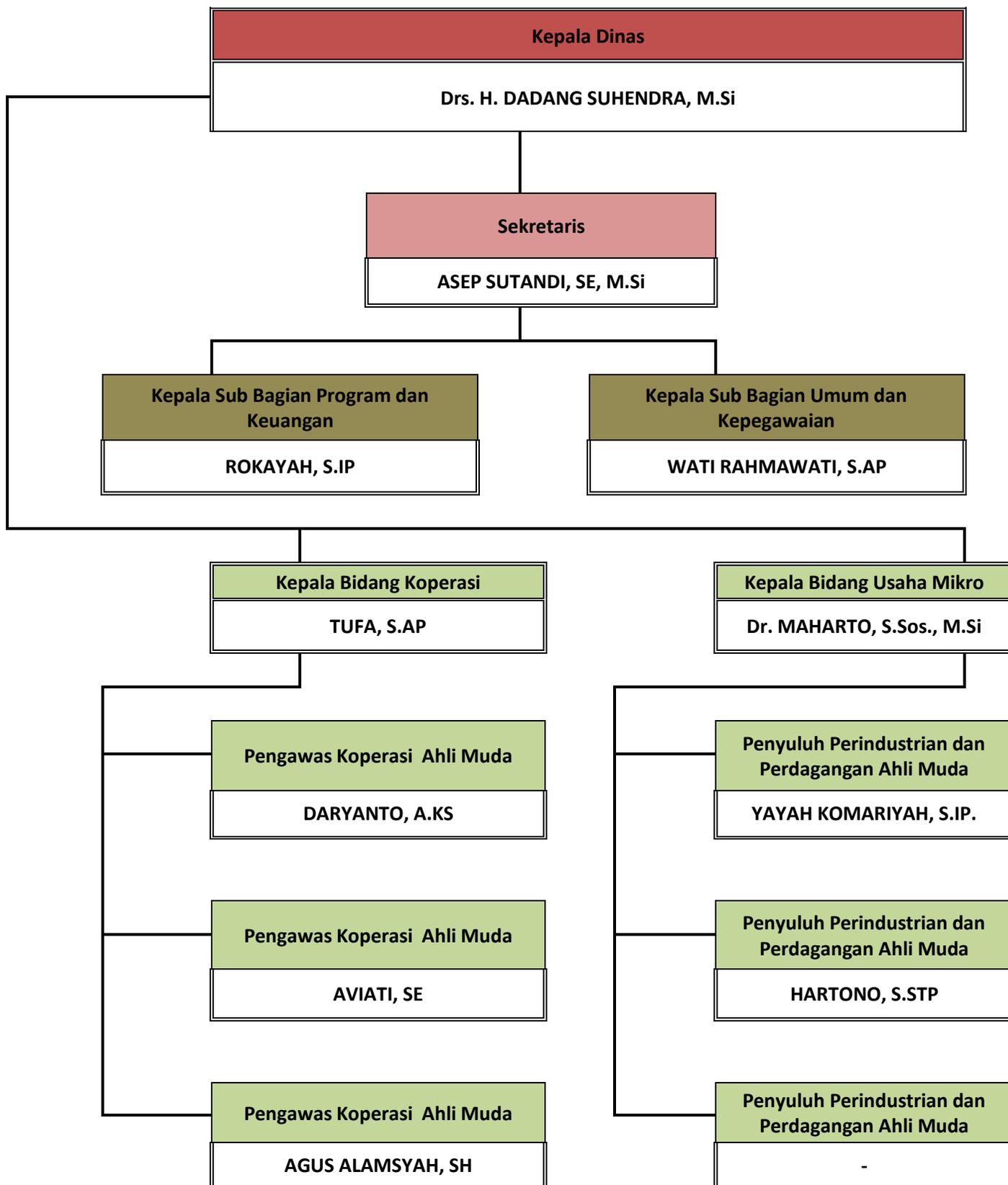
Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 42, Seri D).

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon merupakan unsur pelaksana penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan susunan organisasi sebagai berikut:





1.1.1 Struktur Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah



Sumber dari Data kepegawaian tahun 2023.





1.2 Tugas dan Fungsi

Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Diskopukm) Kabupaten Cirebon merupakan dinas teknis di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Pembentukan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon.

Berdasarkan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 42 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok dan Tata Kerja Dinas Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, bahwa setiap jabatan struktural pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon mempunyai tugas umum sesuai dengan ruang lingkup dinas / sekretariat / bidang / subbagian / seksi / UPT / kelompok jabatan fungsional, meliputi:

- a. Perumusan bahan perencanaan pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
- b. Perumusan kebijakan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
- c. Fasilitasi perizinan simpan pinjam untuk koperasi;
- d. Pengawasan dan pemeriksaan koperasi;
- e. Penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi;
- f. Penyelenggaraan pendidikan dan latihan perkoperasian;
- g. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi;
- h. Pemberdayaan usaha Mikro;
- i. Pengembangan usaha Mikro;
- j. Pelaksanaan administrasi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.





1.3 Isu-isu Strategis

Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun internal Instansi. Isu strategis yang melingkupi Dinas Koperasi dan Usaha dan Menengah Kabupaten Cirebon antara lain sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan daya saing produk UKM terhadap perkembangan tren pasar, baik untuk pangsa dalam negeri ataupun luar negeri.
- 2) Mendesak penyelesaian terhadap koperasi-koperasi bermasalah dan penguatan SDM perkoperasian.
- 3) Penguatan UMKM dengan Teknologi informasi dalam pengembangan UMKM.

1.4 Keadaan Pegawai

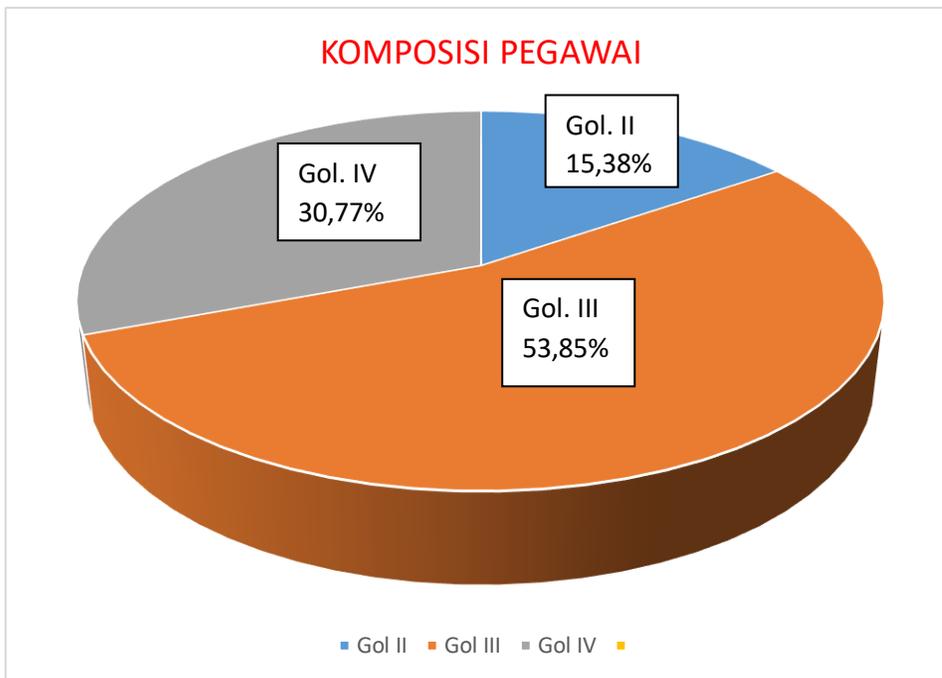
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sebanyak 13 (tiga belas) pegawai, terbagi atas berbagai Golongan, komposisi pegawai dinas koperasi dan usaha kecil dan menengah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.4.1
Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon berdasarkan Golongan

Uraian	Golongan			Jumlah
	II	III	IV	
Sekretariat	2	2	2	6
Bidang Koperasi	-	3	1	4
Bidang Usaha Mikro	-	2	1	3
	2	7	4	13

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon 2023.





Gambar 1.4.1 Diagram Komposisi Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan jenjang pendidikan, sebagaimana disajikan pada table 1.4.2 dan gambar 1.4.2 , sebagian besar pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten adalah Lulusan Sarjana (S1) yaitu sebanyak 8 Pegawai, dikuti Lulusan Pasca sarjana (S2) sebanyak 2 Pegawai, lulusan SMA/SLTA atau yang sederajat sebanyak 2 Pegawai dengan Lulusan Doktor (S3) hanya 1 pegawai.

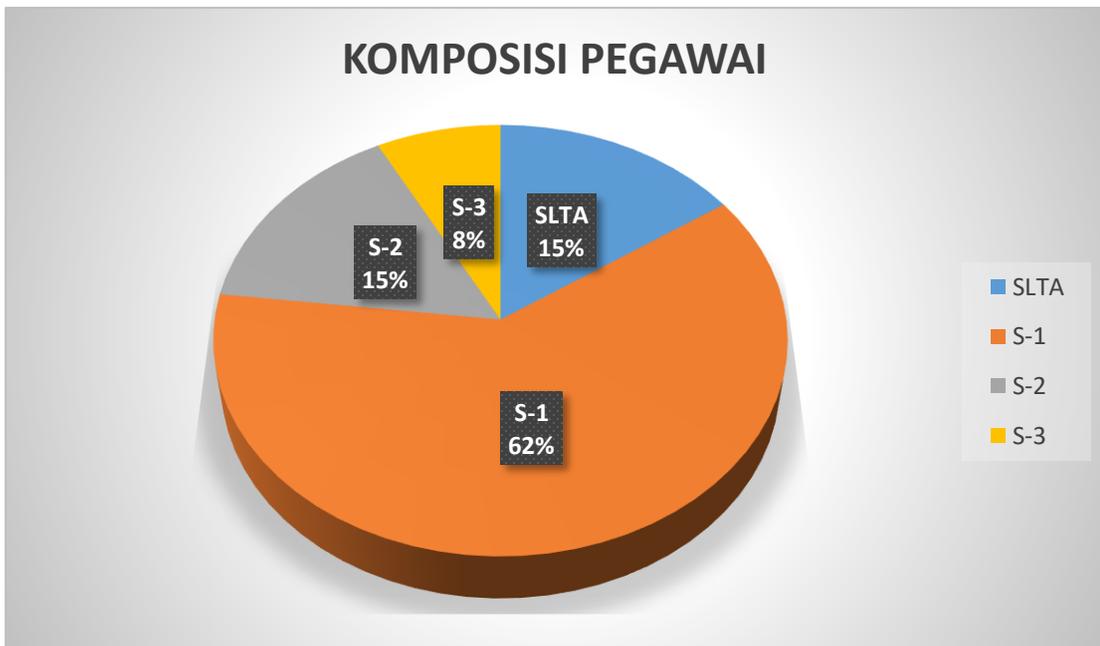
Tabel 1.4.2

Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon berdasarkan Jenjang Pendidikan

Uraian	Jenjang Pendidikan				Jumlah
	SLTA	SI	S2	S3	
Sekretariat	2	2	2	-	6
Bidang Koperasi	-	2	-	1	3
Bidang Usaha Kecil	-	4	-	-	4
	2	8	2	1	13

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.





Gambar 1.4 .2 Diagram Komposisi pegawai menurut Jejang Pendidikan

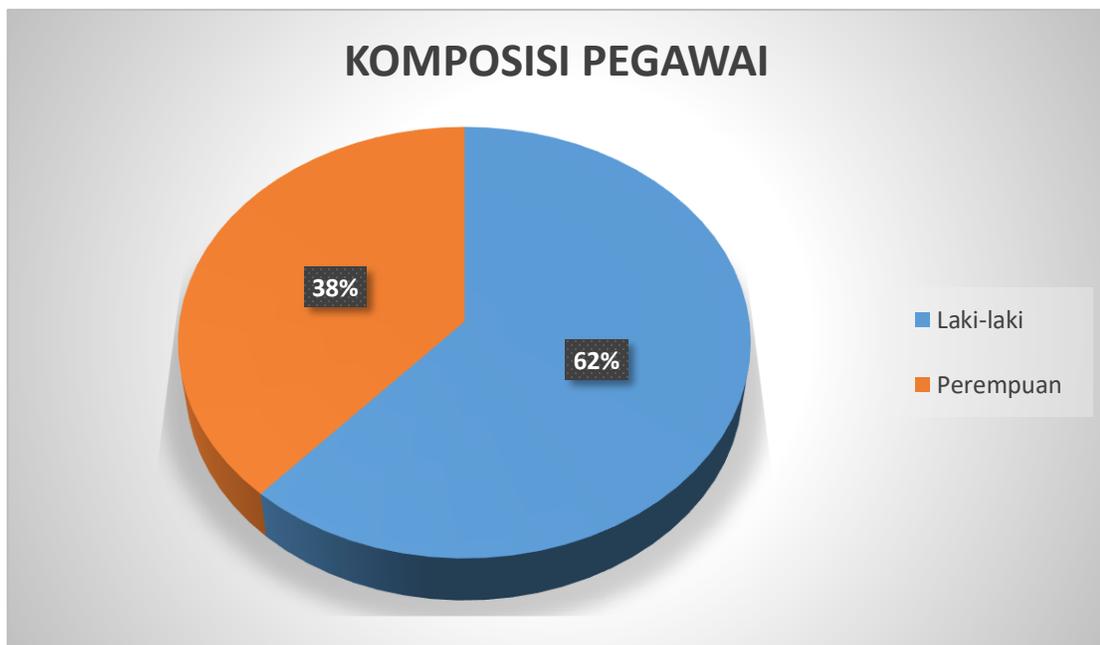
Berdasarkan Jenis Kelamin, Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon terdiri dari 8 Pegawai Laki-laki dan 5 Pegawai Perempuan yakni sebagai berikut :

Tabel 1.4.3
Komposisi Pegawai Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon berdasarkan Jenis Kelamin

Uraian	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Sekretariat	4	2	6
Bidang Koperasi	2	2	4
Bidang Usaha Kecil	2	1	3
	8	5	13

Sumber : Sub Bag Umum dan Kepegawaian Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023.





Gambar 1.4.3 Diagram Komposisi pegawai menurut Jenis Kelamin

1.5 Keadaan Sarana dan Prasarana

secara umum sarana dan prasarana Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon terutama sarana prasarana pokok berupa Meja Kerja, Komputer dan Jaringan Internet cukup memadai. Tersedia meja kerja bagi semua pegawai. Lebih terinci uraian sarana prasarana yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sebagai berikut :

Tabel 1.5.1
Sarana dan Prasarana yang dimiliki Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

URAIAN	JUMLAH
Kendaraan roda empat	7 buah
Kendaraan roda dua	5 buah
Ruang rapat	1 buah
Mesin Ketik	1 buah
Komputer	21 buah
Laptop	12 buah
Printer	17 buah
LCD Proyektor	1 buah
Telepon/Mesin Fax	1 buah





Kamera	4 buah
Handycam	1 buah
TV	3 buah
Meja kerja	30 buah
Kursi kerja	30 buah
Meja Rapat	15 buah
Kursi Rapat	60 buah
Almari	30 buah
Filling Cabinet	25 buah
Cash Box	1 buah
Lemari Es	1 buah
Mesin Penghancur Kertas	5 buah
scanan	7 buah
Mesin Fotocoy	1 buah

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan tugas dan fungsi dari pada Dinas Koperasi dan Usaha dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Cirebon. Pada Anggaran Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp.7.212.463.384,00,- (Anggaran perubahan) dengan rincian operasi Rp.6.137.408.784,00,- dan belanja modal sebesar Rp. 984.054.600,00,- yang diperuntukkan baik untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indicator sasaran strategi maupun program-program pendukung lebih terinci sebagai berikut :





Tabel 1.6.1
Program, Kegiatan dan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon TA 2023

URAIAN		ANGGARAN (Rp.)
I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		4.800.300.800
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.031.800
	2. Administrasi Keuangan	3.319.801.900
	3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.098.000
	4. Administrasi Umum Perangkat Daerah	419.371.600
	5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Ueusan Pemerintah Daerah	89.531.300
	6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83.601.400
	7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	835.864.800
II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi		50.000.100
	1. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	50.000.100
III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi		150.000.000
	1. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kab/Kota	150.000.000
IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian		339.757.300
	1. Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	339.757.300
V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi		141.518.044
	1. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	141.518.044
VI. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)		464.933.740
	1. Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Ke4mudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	464.933.740
VII. Program Pengembangan UMKM		1.174.953.400
	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	1.174.953.400

Sumber Data : Sub Bag Program dan Keuangan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, Desember 2023.





1.7 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Ringkasan eksekutif memuat :

1. Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.
2. Disebutkan pula langkah-langkah apa yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut dan langkah antisipatif untuk menganggulangi kendala yang mungkin akan terjadi pada tahun mendatang.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/ manfaat LKjIP, struktur organisasi, tugas dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, potensi yang menjadi ruang lingkup PD dan sistematika penulisan LKjIP.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi kepala Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran





organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indicator kinerja dan efesiensi.

Disajikan pula inovasi yang telah dilakukan oleh Perangkat Daerah. Inovasi dimaknai sebagai penemuan hal-hal baru atau proses kreatif terhadap sesuatu yang sudah ada maupun yang sudah ada sebelumnya. Inovasi dianggap mampu meningkatkan nilai tambah output kegiatan yang berkualitas.

BAB IV PENUTUP

Pda bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/ kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN





BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024.

Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon yang tertuang dalam Program Pemerintah Daerah (Properda) Kabupaten Cirebon tahun 2019-2024, yaitu: ***“Terwujudnya kabupaten cirebon berbudaya, sejahtera, agamis, maju dan aman”***(BERSAMA).

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Kabupaten Cirebon BERBUDAYA
Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan budaya, tradisi dan adat
2. Kabupaten Cirebon SEJAHTERA
Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi
3. Kabupaten Cirebon AGAMIS
Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun dan beretika
4. Kabupaten Cirebon MAJU
Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah
5. Kabupaten Cirebon AMAN
Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusifitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional

2.1.1. Visi dan Misi

Pembinaan terhadap koperasi dan usaha mikro, kecil, menengah tercakup pada Misi ke 4 Pemerintah Kabupaten Cirebon, yaitu Meningkatkan produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga





menambahkan daya saing di pasar internasional dan regional yang didukung peningkatan kapasitas aparaturnya pemerintah daerah.

Untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Cirebon tersebut, maka pembangunan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah, yang merupakan bagian integral dari pembangunan daerah Kabupaten Cirebon, dilaksanakan berdasarkan Visi yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yaitu: **“Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Sebagai Penggerak Perekonomian Daerah, Berdaya Saing, Berkualitas, dan Berkeadilan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat”**.

Dalam rangka pencapaian Visi tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) Misi sebagai berikut:

1. Meningkatkan Kualitas dan Kapasitas SDM Aparatur Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
2. Meningkatkan Kualitas Manajemen Kelembagaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
3. Meningkatkan Akses Pembiayaan, Teknologi, Pemasaran, dan Jaringan Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
4. Mendorong Kemandirian dan Daya Saing Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
5. Mewujudkan Iklim Usaha yang Kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

2.1.2. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

Tujuan, Sasaran, Serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang merupakan penjabaran dari Misi, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.2.1

Tujuan, Sasaran, Serta Indikator Sasaran Jangka Menengah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	
				2022	2023
1.	Menurunkan angka pengangguran	Meningkatnya pertumbuhan	1. Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi,	100 Prosen	100 Prosen





		ekonomi sektor unggulan	pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM		
			2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	100 Prosen	100 Prosen
2.	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan yang inklusif dan berkeadilan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	88 Poin	90 Poin
3.	Meningkatkan koperasi yang sehat dan mandiri	Meningkatnya kualitas koperasi	Prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan omzet dan anggota 5%)	40 Prosen	45 Prosen
4.	Terwujudnya peningkatan daya saing di tingkat provinsi Jawa Barat (Regional Market Share)	Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro	Pertumbuhan rata-rata nilai omset/ produksi usaha mikro	12,44 Prosen	12,44 Prosen
5.	Terwujudnya kemandirian, berdaya saing dan digitalisasi UMKM	Meningkatnya kemandirian, berdaya saing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi usaha mikro	7 Prosen	10 Prosen
6.	Mewujudkan tata kelola perkantoran yang efektif dan efisien	Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran	Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel	90 Prosen	90 Prosen

Sumber : Metadata Renstra 2019-2024

2.1.3. Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Faktor terpenting dalam proses perencanaan strategis, adalah menentukan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menyeluruh dan terpadu terhadap upaya-upaya organisasi melalui penetapan kebijakan dan operasionalisasi program dan kegiatan dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi.

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi.





Berpedoman pada visi dan misi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon, maka disusun strategi untuk pengembangan Koperasi dan UMKM di Kabupaten Cirebon. Penjabaran strategi diwujudkan dalam bentuk kebijakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.1.3.1
Strategi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

No.	Sasaran Strategis	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas koperasi	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota
		Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kab/Kota	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota
		Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
		Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan





				restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi
2.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Program Pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM)	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	1. Pendataan Potensi dan pengembangan usaha mikro
				2. Pemberdayaan Melalui kemitraan Usaha Mikro
				3. Fasilitasi kemudahan usaha mikro
				4. Pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro
				5. Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemngku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro
		Program Pengembangan UMKM	Pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil	Fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan terkologi

Sumber : DPPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2023





2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Rencana Kinerja Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.1.
Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Penjelasan / Formula
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM 2. meningkatnya kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	Meningkatkan kualitas daya saing KUMKM
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi
3.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Rasio Koperasi yang sehat dan mandiri
4.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Proporsi pangsa pasar Usaha Mikro Kabupaten Cirebon di Tingkat Regional
5.	Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi Usaha Mikro	Market Share Usaha Mikro Kab. Cirebon terhadap market Jawa Barat
6	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Meningkatnya Tertib Administrasi, Tertib Pertanggungjawaban dan Tertib Keuangan





Adapun sasaran pencapaian kinerja pada tahun 2023, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan dengan indikator :
 - Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM
 - Meningkatnya kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi
2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dengan indikator :
 - Indeks Kepuasan Masyarakat
3. Meningkatnya kualitas koperasi dengan indikator :
 - prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)
4. Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro dengan indikator :
 - Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro
5. Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM dengan indikator :
 - Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi Usaha Mikro
6. Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran dengan indikator :
 - Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel

2.3. Rencana Anggaran Tahun 2023

Pada Anggaran Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon untuk anggaran murni sebesar Rp6.839.249.984,00. Anggaran tersebut mengalami peningkatan melalui mekanisme perubahan APBD 2023 yakni menjadi sebesar Rp7.121.463.384,00.

2.3.1 Target Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Target Belanja pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon secara rinci dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.3.1.1

Target Belanja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon APBD Murni dan Perubahan Tahun 2023

Uraian	Target Murni	Target Perubahan
Belanja Operasi	6.839.249.984	6.137.408.784
Belanja Modal	871.458.000	984.054.600
Jumlah	6.839.249.984	7.121.463.384





2.3.2 Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategi

Total Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebesar Rp2.321.162.584 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.2.1

Anggaran Daerah per Sasaran Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Sasaran	Anggaran Murni	Anggaran Perubahan
1.	Meningkatnya kualitas koperasi	681.275.444	681.275.444
2.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	1.511.085.140	1.639.887.140
3.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	4.646.889.400	4.800.300.800
	Jumlah	6.839.249.984	7.121.463.384

Sumber: DPPA Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon 2023

Sasaran meningkatnya kualitas koperasi tidak mendapatkan penambahan dengan anggaran Rp681.275.444. sedangkan sasaran meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp128.802.000. untuk sasaran Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran mendapatkan penambahan anggaran sebesar Rp153.411.400.





2.4 Instrumen Pendukung





BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan.

Laporan kinerja disusun oleh setiap tingkatan organisasi yang menyusun perjanjian kinerja dan menyajikan informasi tentang:

1. Uraian singkat organisasi;
2. Rencana dan target kinerja yang ditetapkan;
3. Pengukuran kinerja;
4. Evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan dan kondisi terakhir yang seharusnya terwujud. Analisis ini juga mencakup atas efisiensi penggunaan sumber daya.

Sebagai perwujudan kewajiban dari suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka secara periodik disusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP).

Berikut ini gambaran mengenai akuntabilitas kinerja dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah selama Tahun 2023, meliputi penjelasan mengenai perencanaan strategis, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, evaluasi dan analisis akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis keberhasilan dan kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil yaitu :





Tabel 3.1.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	91≤100	Sangat Baik
2.	76≤90	Tinggi
3.	66≤75	Sedang
4.	51≤65	Rendah
5.	≤50	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk presentase, indeks, rata-rata, angka dan jumlah. Presentase capaian kinerja dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan tingkat capaian yang semakin baik.

Perhitungan persentase capaian kinerja memperhatikan karakteristik komponen realisasi yakni semakintinggi realisasi menunjuk pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Capaian kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Pengukuran kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon menggunakan rumus diatas, berlaku untuk semua indicator kinerja. Hal ini dikarenakan ketiga indicator kinerja sama yakni semakin tinggi realisasi semakin baik capaian kinerjanya.

Indikator kinerja sebagai tolak ukur keberhasilan dari suatu kegiatan dan sasaran strategis yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :





Tabel 3.1.2
Capaian Kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Cirebon Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1.	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sektor Unggulan	Sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	Prosen	100	100	100,00
		Kemampuan pengelolaan kelambagaan koperasi	Prosen	92	92	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat	poin	90	90	100,00
3.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Prosen	45	45	100,00
4.	Meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro	Pertumbuhan rata-rata nilai omset/ Produksi usaha mikro	Prosen	12.44	12.44	100,00
5.	Meningkatkan kemandirian, berdayasaing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai Produksi usaha mikro	Prosen	10	10	100,00
6.	Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran	Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel	Prosen	90	90	100,00

Sumber : Triwulan IV TA 2023





Dari table diatas, terdapat enam sasaran dan tujuh indikator kinerja. Pada tahun 2023, lebih terinci sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan memiliki dua indicator yakni untuk indicator kinerja sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM dengan capaian 100% dari target 100%. Untuk indicator kinerja Kemampuan pengelolaan kelambagaan koperasi dengan capaian 100% dari target 92%.
2. Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan public dengan indicator kinerja indeks kepuasan masyarakat dengan pencapaian 100% dari target 90 poin.
3. Sasaran meningkatnya kualitas koperasi dengan indicator kinerja prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %) dengan capaian 100% dari target 45%.
4. Sasaran meningkatnya kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro dengan indicator kinerja Pertumbuhan rata-rata nilai omzet/ Produksi usaha mikro dengan capaian 100% dari target 12.44%.
5. Sasaran Meningkatkan kemandirian, berdayasaing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM dengan capaian 100% dari target 10%.
6. Sasaran Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran dengan capaian 100% dari target 90%.

3.2. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Sasaran Strategis

Dalam sub bag ini akan menjelaskan bagaimana pencapaian sasaran strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara secara rinci untuk setiap indikator kinerja menurut sasaran strategis yang diuraikan sebagai berikut :





Tabel 3.2.1
Sasaran Sstrategis dan indicator kinerja dengan
realisasinya

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Kualitas Koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut,pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	Rp.	681.275.444	676.266.940	99,26
2.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	Rp.	1.639.887.140	1.497.918.400	91,34
3.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	Rp.	4.800.300.800	4.217.751.721	87,86

Analisa dari table diatas sebagai berikut :

- 1 Untuk sasaran strategis Meningkatnya Kualitas Koperasi dengan indicator kinerja prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut,pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %) dengan target anggaran sebesar Rp681.275.444 dengan realisasi sebesar Rp676.266.940 atau dengan capaian sebesar 99,26%.
- 2 Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro dengan indicator kinerja Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro yang semula dengan target anggaran sebesar Rp1.639.887.140 terealisasi sebesar Rp1.497.918.400 atau dengan capaian sebesar 91,34%.
- 3 Sasaran Strategis Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran dengan indicator kinerja Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel dengan anggaran sebesar Rp4.800.300.800 terealisasi sebesar Rp4.217.751.721 atau dengan capaian sebesar 87,86%.





Indikator sasaran poin 1 dapat dicapai dengan melaksanakan empat program kegiatan yakni program pengawasan dan pemeriksaan koperasi, program Penilaian kesehatan KSP/USP koperasi, program pendidikan dan latihan perkoperasian serta program pemberdayaan dan perlindungan koperasi

Indicator sasaran poin 2, dapat dicapai melalui dua program diantaranya Program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM).

Indicator sasaran poin 3, dapat dicapai melalui satu program yakni program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

3.2.1. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu

Berdasarkan pengukuran hasil realisasi indikator kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Tahun 2023, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.2.1.1.
Perbandingan Realisasi Kinerja
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
Tahun 2022 dan 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Tahun 2022			Tahun 2023			Kenaikan / (Penurunan)
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1. Meningkatkan sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	100,00 %	100,00%	100,00 %	100,00	100,00	100,00	0
		2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	91%	91%	100,00 %	92,00	92,00	100,00	1 %
2.	Meningkatnya kualitas	Indeks Kepuasan Masyarakat	88 poin	88 poin	100%	90 poin	90 poin	100,00	2 poin





	pelayanan publik								
3.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	40%	40%	100%	45 %	45%	100,00	5%
4.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	12.44 %	12.44%	100,00	12.44%	12.44%	100,00	0
5.	Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi Usaha Mikro	7%	7%	100%	10%	10%	100,00	3 %
6.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	90%	90%	100%	90%	90%	100%	0

Analisa Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 sebagai berikut :

1. Realisasi prosentase Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pada indicator Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM pada Tahun 2023, capaian kinerja adalah sebesar 100% atau **tidak adanya kenaikan atau penurunan** jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 100%.
Sedangkan pada indicator Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi pada tahun 2023 ada kenaikan 1% **lebih tinggi**





yakni sebesar 92% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 91%.

2. Realisasi prosentase Meningkatnya kualitas pelayanan publik pada tahun 2023 ada kenaikan 2 poin **lebih tinggi** yakni sebesar 90 poin jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebesar 88 poin. Hal ini disebabkan karena meningkatnya kualitas pelayanan public.
3. Realisasi Prosentase Kualitas Koperasi pada Tahun 2023, capaian kinerja adalah sebesar 100% atau **tidak adanya kenaikan atau penurunan** jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sama besarnya 100%.
4. Realisasi prosentase Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro pada Tahun 2023, capaian kinerja adalah sebesar 100% atau **tidak adanya kenaikan atau penurunan** jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sama besarnya 100%.
5. Realisasi prosentase Meningkatkan Kemandirinan, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM pada Tahun 2023, terdapat kenaikan 3% **lebih tinggi** yakni 10% jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sebesar 7%.
6. Realisasi prosentase Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran pada Tahun 2023, capaian kinerja adalah sebesar 100% atau **tidak adanya kenaikan atau penurunan** jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022 yakni sama besar 100%.

3.2.2. Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023

Pengukuran hasil realisasi indikator kinerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon sampai dengan 2023 jika dibandingkan dengan target kinerja jangka menengah yang terdapat dalam RENSTRA 2019-2024, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:





Tabel 3.2.2.1
Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja s.d. 2023	Realisasi Kinerja			Realisasi Kinerja s.d. 2023
				2021	2022	2023	
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	100 %	-	100%	100%	100%
		2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	92%	90	91%	92%	100%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90%	86%	88%	90%	100%
3.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yangmeningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut,pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	45%	40 %	40%	45%	100%
4.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	12.44%	12.44%	12.44%	12.44%	12.44%
5.	Meningkatkan Kemandirian,Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi Usaha Mikro	10%	7%	7%	10%	100%
6.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik	90%	90%	90%	90%	100%





		yang Transparan dan akuntabel					
--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--

Analisa Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2023 yakni:

1. Realisasi kinerja prosentase Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan sampai dengan tahun 2023 adalah sebesar 100,00% atau **sama tinggi** jika dibandingkan dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2022.
2. Realisasi indeks kepuasan masyarakat pada tahun 2023 mengalami kenaikan lebih tinggi yakni 90 poin jika dibandingkan dengan tahun 2022 dengan 88 poin dan 2021 dengan 86 poin.
3. Realisasi kinerja prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %) pada tahun 2023 adalah sebesar 45% atau **lebih besar** jika dibandingkan dengan target kinerja dengan Tahun 2022 dan tahun 2021 sebesar 40%.
4. Realisasi kinerja Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro sampai dengan Tahun 2023 adalah sebesar 12,44% atau **sama tinggi** jika dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2022 dan 2021.
5. Realisasi kinerja prosentase Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM Tahun 2023 adalah sebesar 10% atau **lebih tinggi** jika dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2022 dan 2021.
6. Realisasi kinerja Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran Tahun 2023 adalah sebesar 90% atau sama **tinggi** jika dengan target kinerja sampai dengan Tahun 2022 dan 2021.

3.2.3. Perbandingan Realisasi Tahun 2023 dengan Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Adapun penjelasan perbandingan antara realisasi tahun 2023 dengan peringkat Jawa Barat di level peringkat Jawa Barat, sebagai berikut :





- 1.
- 4 Meningkatkan kualitas pelayanan publik
- 5 Meningkatkan kualitas koperasi
- 6 Meningkatkan kapasitas usaha dan produktivitas usaha mikro
- 7 Meningkatkan kemandirian, berdayasaing, kualitas produksi dan digitalisasi UMKM
- 8 Terpenuhinya dukungan tata kelola perkantoran

3.2.4. Faktor Pendorong/ factor Penghambat.

Didalam menjalankan program, kegiatan dan sub kegiatan akan selalu dihadapkan pada factor-faktort pendorong/ keberhasilan dan factor-faktor penghambat/kegagalan, dianta lain :

1. Untuk Sasaran Poin 1, dengan indicator sumber pembiayaa, pemanfaatan teknologi pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM adapun factor yang menjadi pendorong atau keberhasilan karna adanya program unggulan BDS, adanya market place (Galeri Caruban), serta adanya galeri UMKM. Dan factor hambatan yang ada termasuk kurangnya inovasi serta kemasan yang belum optimal cenderung sederhana.

Unruk indikaror Kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi adapun factor pendukung keberhasilannya yakni adanya program diklat perkoperasian dimana peserta memiliki serrtifikasi manajemen serta pengetahuan soal dasar-dasar perkoperasian sedangkan factor penghambatnya adalah SDM pengelola koperasi yang masih kurang memahami tentang pemahaman perkoperasian.

2. Untuk Sasaran Poin 2, dengan indicator Indeks kepuasan masyarakat adapun factor keberhasilannya yakni paham dan keterampilan pegawai dalam pelaksanaan pembuatan laporan, matangnya perencanaan. Serta factor penghambatnya tidaklain ialah lemahnya pengawasan serta adanya sikap apatis dari masyarakat.
3. Untuk Sasaran Poin 3, dengan indicator prosentase koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut, pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %) adapun factor





keberhasilannya Yakni SDM yang berkualitas dalam pembuatan Laporan Keuangan dan perkembangan koperasi sedangkan factor penghambatnya masih ada koperasi yang belm memahami regulasi perkoperasian terutama mengenai RAT.

4. Untuk Sasaran Poin 4, dengan indicator Pertumbuhan rata-rata nilai omset/ Produksi usaha mikro adapun factor keberhasilannya melakukan kemitraan dengan took oleh-oleh dan toko modern, adanya galeri serta sering diadakannya bazar dan pameran. Serta faktro penghambatnya ialah kemasan produk masih sederhana serta masih adanya konsinyasi/ system menitip ditoko oleh-oleh.
5. Untuk Sasaran Poin 5, dengan indicator Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai Produksi usaha mikro adapun factor keberhasilannya karena adanya market place atau aplikasi bernama Galeri Caruban dan bermitra dengan market place lainnya. Sedangkan factor penghambatnya ialah rendahnya SDM terhadap digitalisasi.
6. Untuk Sasaran Poin 6, dengan indicator Meningkatnya pelayanan public yang transparan dan akuntabel adapun factor keberhasilannya ialah esadaran pegawai mengenai tindakan terhadap tugas/pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, sehingga membawa pengaruh yang positif dan menimbulkan pelayanan yang baik, sarana pelayanan yang memadai dan mencukupi sehingga tercipta efektifitas dan efesiensi suatu pelayanan. Sedangkan factor penghambatnya ialah Sumber daya aparatur yang kurang kompeten, Lemahnya sistem pengawasan anggaran, Lemahnya pengawasan dan Adanya sikap apatis dari masyarakat.

3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Lainnya

Dalam sub bag ini akan menjelaskan bagaimana pencapaian sasaran strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja. Adapun evaluasi dan analisis secara secara rinci untuk setiap indicator kinerja menurut sasaran strategis yang diuraikan sebagai berikut :





Table 3.3.1
Sasaran Indikator dengan Realisasi Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja Sasaran	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi sektor unggulan	1.Meningkatnya sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM	100,00	100,00	100,00
		2. Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi	92,00	92,00	100,00
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	90 poin	90 poin	100,00
3.	Meningkatnya kualitas koperasi	prosentase koperasi yangmeningkat kualitasnya berdasarkan RAT (tiga tahun berturut-turut,pertumbuhan Omzet dan anggota 5 %)	45 %	45%	100,00
4.	Meningkatnya Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro	Pertumbuhan Rata-Rata Nilai Omset/ Produksi Usaha Mikro	12.44%	12.44%	100,00
5.	Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM	Pertumbuhan rata-rata nilai omset atau nilai produksi Usaha Mikro	10%	10%	100,00





6.	Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran	Meningkatnya Pelayanan Publik yang Transparan dan akuntabel	90%	90%	100%
----	---	---	-----	-----	------

Analisa Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut :

1. Realisasi prosentase Meningkatkan pertumbuhan ekonomi sektor unggulan pada indicator Meningkatkan sumber pembiayaan, pemanfaatan teknologi, pemasaran dan jaringan usaha bagi KUMKM pada Tahun 2023, capaian kinerja adalah sebesar 100% dari target 100%.
Sedangkan pada indicator Meningkatkan kemampuan pengelolaan kelembagaan koperasi pada tahun 2023 dengan target sebesar 92% atau dengan capaian sebesar 100%.
2. Realisasi prosentase Meningkatkan kualitas pelayanan publik pada tahun 2023 dengan target sebesar 90 poin atau dengan capaiannya sebesar 100%.
3. Realisasi Prosentase Kualitas Koperasi pada Tahun 2023, dengan target 45% atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.
4. Realisasi prosentase Meningkatkan Kapasitas Usaha dan Produktivitas Usaha Mikro pada Tahun 2023 dengan target 12.44% atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.
5. Realisasi prosentase Meningkatkan Kemandirian, Berdaya saing, Kualitas Produksi dan Digitalisasi UMKM pada Tahun 2023 dengan target 10%, atau dengan capaian sebesar 100%.
6. Realisasi prosentase Terpenuhinya Dukungan Tata Kelola Perkantoran pada Tahun 2023 dengan target 90%, atau dengan capaian kinerja sebesar 100%.

3.4. Realisasi Anggaran

3.4.1. Realisasi Anggaran APBD

Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023. Realisasi Belanja Daerah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 adalah Rp6.391.839.061,00





atau mencapai 89,75% alokasi anggaran sebesar Rp7.121.463.384,00. Sedangkan Realisasi Belanja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp9.799.736.188,00 atau mencapai 92,43% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.988.101.840,00.

Realisasi Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 lebih rinci dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel 3.4.1.1.
Realisasi Anggaran Pendapatan, Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023

KODE REK.	URAIAN	JUMLAH (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSEN (%)
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN DAERAH	-	-	-	0,00%
	JUMLAH PENDAPATAN	-	-	-	0,00%
5.	BELANJA DAERAH	7.121.463.384,00	6.391.839.061,00	729.624.323,00	89,75%
5.1	BELANJA OPERASI	6.137.408.784,00	5.439.231.648,00	698.177.136,00	88,62%
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	3.274.724.800,00	2.754.815.812,00	519.908.979,00	84,12%
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	2.862.683.984,00	2.684.415.827,00	178.268.157,00	93,77%
5.2	BELANJA MODAL	984.054.600,00	952.607.413,00	31.447.187,00	96,80%
5.2.02	BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	298.921.000,00	298.921.000,00	-	100%
5.2.03	BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	685.133.600,00	653.686.413,00	31.447.187,00	95,41%





SURPLUS/ (DEFISIT)	(7.121.463.384,00)	(6.391.839.061,0 0)	(729.624.323,0 0)	89,75%
-------------------------------	------------------------	------------------------	----------------------	--------

Dinas Koperas dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon melaksanakan 2 (dua) urusan pemerintahan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan wajib Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.

3.4.2. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada Tahun 2023 dilaksanakan melalui 1 (satu) Program dan 7 (Tujuh) Kegiatan dengan 20 (dua puluh) Sub kegiatan, dengan anggaran sebesar Rp4.800.300.800,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.217.753.721,00 sisa sebesar Rp.582.547.079,00 atau tercapai sebesar 87,86%, Sedangkan Realisasi Urusan Wajib Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon pada Tahun Anggaran 2023 didukung melalui 6 (enam) program dengan 6 (enam) kegiatan dan 10 (sepuluh) sub kegiatan dengan anggaran sebesar Rp2.174.085.340.,00 atau mencapai 93,66% dari alokasi anggaran sebesar Rp2.321.162.584,00 sisa sebesar Rp147.077.244,00 atau tercapai sebesar 6,34%.

Urusan pemerintahan yang dijalankan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon melalui program dan kegiatan tersebut terinci sebagai berikut:

Tabel 3.4.2.1
Realisasi Anggaran Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon
Tahun Anggaran 2023

No	Program/ Kegiatan	Sub Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Keuangan	Capaian (%)
1	2	3	4	5	6
	Belanja Daerah		7.121.463.384	6.391.839.061	89,75
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		4.800.300.800	4.217.753.721	87,86
	1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	42.031.800	38.741.500	92,17
		1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	33.415.200	32.002.800	95,77





			2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1.559.900	300.000	19,23
			3.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	2.290.700	1.828.700	79,83
			4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.766.000	4.610.000	96,73
	2.	Administrasi Keuangan Daerah		Perangkat	3.319.801.900	2.798.329.321	84,29
			1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.274.724.800	2.754.815.821	84,12
			2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	40.482.600	39.039.000	96,43
			3.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.594.500	4.474.500	97,39
	3.	Administrasi Kepegawaian Daerah		Perangkat	10.098.000	10.098.000	100,00
			1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	10.098.000	10.098.000	100,00
	4.	Administrasi Umum Daerah		Perangkat	419.371.600	412.486.900	98,36
			1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	8.541.000	8.399.100	98,34
			2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	212.842.700	212.729.000	99,95
			3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	4.291.700	3.366.600	78,44
			4.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	19.791.500	19.782.100	99,95
			5.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	44.400.000	44.400.000	100,00





			6.	Penyediaan Bahan/ Material	83.044.700	77.975.100	93,90
			7.	Fasilitas Kunjungan Tamu	6.000.000	5.400.000	90,00
			8.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40.460.000	40.435.000	99,94
	5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang urusan Pemerintah Daerah			89.531.300	89.457.200	99,92
			1.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	0	0	0,00
			2.	Pengadaan Mebeul	24.369.200	24.369.200	100,00
			3.	Pengadaan Peralatan dn Mesin	39.967.400	39.938.000	99,93
			4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Kainnya	25.194.700	25.150.000	99,82
	6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			83.601.400	73.223.587	87,59
			1.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	83.601.400	73.223.587	87,59
	7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			835.864.800	795.417.213	95,19
			1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peerorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	89.479.000	81.669.100	91,27
			2.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	685.133.600	653.686.413	95,41
			3.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	61.252.200	60.061.700	98,06
	2.	Program Pengawasan dan Pemeriksaan			50.000.100	47.863.200	95,73
		1.	Pemeriksaan dan Pengawasan, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Dalam Daerah Kabupaten/Kota		50.000.100	47.863.200	95,73
			1.	Pengawasa Kekuatan,	50.000.100	47.863.200	95,73





				Kesehatan, Kemandirian serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kab/Kota			
3.	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi				150.000.000	149.591.000	9973
	1.	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam /Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam satu Daerah Kab/Kota			150.000.000	149.591.000	99,73
		1.	Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kab/Kota		150.000.000	149.591.000	99,73
4.	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian				339.757.300	338.498.900	99,63
	1.	Pendidikan dan latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota			339.757.300	338.498.900	99,63
		1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi		339.757.300	338.498.900	99,63
5.	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi				141.518.044	140.213.840	99,08
	1.	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kab/Kota			141.518.044	140.213.840	99,08
		1.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi		141.518.044	140.213.840	99,08





6.	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM)			464.933.740	435.156.700	93,60		
	1.	Pemberdayaan Usaha Mikro yang dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Ke4mudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			464.933.740	435.156.700	93,60	
		1.	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			164.564.040	147.070.800	89,37
		2.	Pemberdayaan Melalui Kemitraan			120.776.000	120.076.000	99,42
		3.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro			27.818.700	25.589.500	91,99
		4.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro			111.150.800	106.812.200	96,10
		5.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro			40.624.200	35.608.200	89,65
7.	Program Pengembangan UMKM			1.174.953.400	1.062.761.700	90,45		
	1.	Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil			1.174.953.400	1.062.761.700	90,45	
		1.	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM serta Desain dan Teknologi			1.174.953.400	1.062.761.700	90,45

Hasil dan realisasi dari pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagai penunjang pembangunan pada sektor Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah beberapa realisasi anggaran yang telah dipagukan untuk masing-masing kegiatan dan sub kegiatan serta sejauh mana hasil capaian output dan outcome dari program dan kegiatan





sebagai evaluasi kinerja yang telah dilaksanakan hal itu dapat dijelaskan sebagai berikut:

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota, alokasi anggaran sebesar Rp4.800.300.800 dan terealisasi sebesar Rp4.217.753.721,00 sisa sebesar Rp582.547.079,00 atau tercapai sebesar 87,86%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan alokasi anggaran sebesar Rp42.031.800,00 dan terealisasi sebesar Rp38.741.500,00 sisa sebesar Rp3.290.300,00 atau tercapai sebesar 92,71%.

- 1.1 Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan sektoral yang tersusun.

Outcome kegiatan adalah Tersusunnya profil dinas koperasi dan UKM

- 1.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

Output kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan sektoral yang tersusun.

Outcome kegiatan adalah Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral yang tersusun.

- 1.3 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

Output kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan sektoral yang tersusun.

Outcome kegiatan adalah Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral yang tersusun.

- 1.4 Sub Kegiatan Evluasi Kinerja Perangkat Daerah

Output kegiatan adalah Jumlah dokumen perencanaan sektoral yang tersusun.





Outcome kegiatan adalah Tersusunnya dokumen perencanaan sektoral yang tersusun.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp3.319.801.900,00 dan terealisasi sebesar Rp2.798.329.321,00 sisa sebesar Rp521.472.579,00 atau tercapai sebesar 84,29%

2.1 Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Output kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya setiap bulan.

Outcome kegiatan adalah Jumlah Pegawai ASN yang terbayar gaji dan tunjangannya setiap bulan.

2.2 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Output kegiatan adalah Jumlah laporan keuangan akhir tahun yang tersusun

Outcome kegiatan adalah tersusunnya laporan keuangan akhir tahun.

2.3 Sub Kegiatan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan

Output kegiatan adalah Jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun

Outcome kegiatan adalah Jumlah laporan Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan yang tersusun

2.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

Output kegiatan adalah Jumlah Laporan keuangan semesteran yang tersusun.

Outcome kegiatan adalah Tersusunnya laporan keuangan semesteran.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp419.371.600,00 dan terealisasi sebesar Rp412.486.900,00 sisa sebesar Rp6.884.700,00 atau tercapai sebesar 98,36%.





- 3.1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Output kegiatan adalah Jumlah Pembelian alat listrik dan penerangan gedung kantor
Outcome kegiatan adalah tersedianya alat listrik dan penerangan.
- 3.2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Output kegiatan adalah Jumlah Pembelian peralatan dan perlengkapan kantor
Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor.
- 3.3 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Output kegiatan adalah Jumlah Pembelian peralatan rumah tangga.
Outcome kegiatan adalah tersedianya peralatan rumah tangga.
- 3.4 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
Output kegiatan adalah Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan
Outcome kegiatan adalah tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan
- 3.5 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Output kegiatan adalah Jumlah Pembelian surat kabar dan pemasangan iklan dan media sosialisasi yang difungsikan untuk menunjang pelayanan admin kantor
Outcome kegiatan adalah tersedianya surat kabar dan iklan.
- 3.6 Penyediaan Bahan/Material
Output kegiatan adalah Jumlah Pembelian alat tulis kantor
Outcome kegiatan adalah tersedianya alat tulis kantor.
- 3.7 Fasilitasi Kunjungan Tamu
Output kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu





Outcome kegiatan adalah Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu

3.7 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Output kegiatan adalah jumlah rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Outcome kegiatan adalah Terlaksananya perjalanan dinas.

4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp89.531.300,00 dan terealisasi sebesar Rp89.457.200,00 sisa sebesar Rp74.100,00 atau tercapai sebesar 99,92%.

4.1 Sub kegiatan Pengadaan Mebeul

Output kegiatan adalah Jumlah pembelian Mebeul

Outcome kegiatan adalah tersedianya Pengadaan Mebeul

4.2 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Output kegiatan adalah Jumlah pembelian Peralatan dan Mesin Kantor

Outcome kegiatan adalah tersedianya Peralatan dan Mesin kantor.

4.3 Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Output kegiatan adalah Jumlah pembelian perlengkapan gedung kantor

Outcome kegiatan adalah tersedianya perlengkapan kantor.

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp83.601.400,00 dan terealisasi sebesar Rp73.223.587,00 sisa sebesar Rp10.377.813,00 atau tercapai sebesar 87,59%.

5.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.





Output kegiatan adalah Jumlah tagihan rekening listrik, air, telepon yang dibayar

Outcome kegiatan adalah terbayarnya tagihan listrik, telepon, air.

6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi anggaran sebesar Rp835.864.800,00 dan terealisasi sebesar Rp795.417.213,00 sisa sebesar Rp40.447.587,00 atau tercapai sebesar 95,19%.

- 6.1 Sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Output kegiatan adalah Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor.

- 6.2 Sub Kegiatan Pemeliharaan Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Output kegiatan adalah Jumlah pemeliharaan gedung kantor

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya gedung kantor.

- 6.3 Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Output kegiatan adalah Jumlah pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Outcome kegiatan adalah terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

2. PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI

Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi, alokasi anggaran sebesar Rp50.000.100,00 dan terealisasi sebesar Rp47.863.200,00 sisa sebesar Rp2.136.900,00 atau tercapai sebesar 95,73%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:





1. Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp50.000.100,00 dan terealisasi sebesar Rp47.863.200,00 sisa sebesar Rp2.136.900,00 atau tercapai sebesar 95,73%.

1.1 Sub kegiatan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Output kegiatan adalah terawasinya koperasi yang dinilai kesehatannya.

Outcome kegiatan adalah Terselenggaranya pengawasan koperasi yang dinilai.

3. PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI

Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi, alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp149.591.000,00 sisa sebesar Rp409.000,00 atau tercapai sebesar 99,73%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp149.591.000,00 sisa sebesar Rp409.000,00 atau tercapai sebesar 99,73%.

1.1 Sub Kegiatan Penghargaan Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

Output kegiatan adalah Jumlah Koperasi yang diawasi dan dinilai penghargaan koperasi

Outcome kegiatan adalah terlaksananya penghargaan koperasi yang diawasi.

4. PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN

Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian, alokasi anggaran sebesar Rp339.757.300,00 dan terealisasi sebesar Rp338.498.900,00





sisa sebesar Rp1.258.400,00 atau tercapai sebesar 99,63%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp339.757.300,00 dan terealisasi sebesar Rp338.498.900,00 sisa sebesar Rp1.258.400,00 atau tercapai sebesar 99,63%.

- 1.1 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

Output kegiatan adalah Tercapainya pengurus, pengawas, manajer, kepala cabang koperasi memiliki sertifikat kompetensi

Outcome kegiatan adalah

1. terlaksananya pelatihan uji kompetensi bagi pengurus koperasi
2. Tercapainya pengurus, pengawas, manajer, kepala cabang koperasi memiliki sertifikat kompetensi
3. meningkatkan kualitas pengembangan kompetensi SDM koperasi
4. Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian Serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI

Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi, alokasi anggaran sebesar Rp141.518.044,00 dan terealisasi sebesar Rp140.213.840,00 sisa sebesar Rp1.304.204,00 atau tercapai sebesar 99,08%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

- 1) Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota, dengan alokasi anggaran sebesar Rp141.518.044,00 dan terealisasi sebesar Rp140.213.840,00 sisa sebesar Rp1.304.204,00 atau tercapai sebesar 99,08%.





1.1 Sub Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Provinsi

Output kegiatan adalah Meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama koperasi, serta meningkatkan akses pengembangan usaha koperasi.

Outcome kegiatan adalah

1. Jumlah koperasi yang meningkat produktifitas koperasi yang difasilitasi akses modal, pasar dan kemitraan usaha
2. Mewujudkan pemberdayaan peningkatan produktifitas
3. meningkatkan dan mengembangkan jaringan kerjasama koperasi, serta meningkatkan akses pengembangan usaha koperasi
4. Jumlah entitas koperasi yang difasilitasi akses modal, pasar dan kemitraan usaha

6. PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)

Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm), alokasi anggaran sebesar Rp464.933.740,00 dan terealisasi sebesar Rp435.156.700,00 sisa sebesar Rp29.777.040,00 atau tercapai sebesar 93,60%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan, dengan alokasi anggaran sebesar Rp464.933.740,00 dan terealisasi sebesar Rp435.156.700,00 sisa sebesar Rp29.777.040,00 atau tercapai sebesar 93,60%.

1.1 Sub Kegiatan Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro





Output kegiatan adalah Jumlah usaha yang produktif, bernilai tambah, memiliki akses pasar, akses pembiayaan, penguatan kelembagaan.

Outcome kegiatan adalah rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

1.2 Sub Kegiatan Pemberdayaan melalui kemitraan Usaha Mikro

Output kegiatan adalah jumlah unit usaha yang telah melaksanakan kemitraan usaha mikro

Outcome kegiatan adalah rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

1.3 Sub Kegiatan fasilitasi kemudahan perizinan usaha mikro

Output kegiatan adalah jumlah usaha mikro yang telah mendapatkan perizinan

Outcome kegiatan adalah rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

1.4 Sub Kegiatan pemberdayaan kelembagaan potensi dan pengembangan usaha mikro

Output kegiatan adalah jumlah usaha yang telah menerima pembinaan dan pendampingan

Outcome kegiatan adalah rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

1.4 Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

Output kegiatan adalah jumlah SDM yang telah melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan usaha mikro

Outcome kegiatan adalah rasio pertumbuhan wirausaha baru yang berskala mikro

7. PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM

Program Pengembangan UMKM, alokasi anggaran sebesar Rp1.174.953.400,00 dan terealisasi sebesar Rp1.062.761.700,00 sisa sebesar Rp112.191.700,00 atau tercapai sebesar 90,45%. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:





1. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil, dengan alokasi anggaran sebesar Rp1.062.761.700,00 sisa sebesar Rp112.191.700,00 atau tercapai sebesar 90,45%.

1.1 Sub Kegiatan fasilitasi usaha mikro menjadi usaha kecil dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi.

Output kegiatan adalah jumlah unit usaha mikro yang terfasilitasi dalam pengembangan produksi dan pengolahan, pemasaran, SDM serta desain dan teknologi.

Outcome kegiatan adalah prosentase usaha mikro yang berkembang nilai omsetnya.

3.4.3 Efisiensi Anggaran

No.	Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi

3.5. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menurut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada tahun 2023 ini, inovasi yang ada di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon adalah adanya pelayanan BDS (business development service) dan adanya market place yakni sebuah aplikasi yang bernama Galeri Caruban.





BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan bentuk pelaksanaan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang sudah ditetapkan pemerintah. LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun berdasarkan kebijakan, program kerja dan kegiatan-kegiatan yang telah ditetapkan oleh instansi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan tetap mengacu kepada kebijakan dan Program Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam upaya mencapai Visi Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon yaitu :**“Mewujudkan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagai penggerak perekonomian Daerah, Berdaya Saing, Berkualitas dan Berkeadilan untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat ”**.

LAKIP Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 disusun dengan tetap berdasarkan memperhatikan indikator, input, output, outcomes secara obyektif dan rasional dengan data yang actual dan relevan sebagaimana yang dilaporkan dalam kegiatan-kegiatan yang mendukung tugas pokok dan fungsi kelembagaan. Penyusunan LAKIP ini juga mengacu pada matriks Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kerja Tahunan (RKT), Penetapan Kinerja (PK) Diskopukm Kabupaten Cirebon ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan, oleh karena itu akan terus dilakukan perbaikan. Besar harapan kami LAKIP ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pembangunan Kabupaten Cirebon khususnya urusan pemerintahan daerah di bidang perekonomian dalam lingkup koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai bahan landasan guna perbaikan kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Cirebon dimasa yang akan datang.

4.2 Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil

Berikut ini merupakan tindak lanjut saran/rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Cirebon terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Cirebon Tahun 2022, di antara lain:

No	Rekomendasi	Tindak Lanjut	Tujuan/ Masalah yang diselesaikan
1.	Program yang menyerap anggaran besar dan focus pada program dan kegiatan ini adalah program utama Dinas	Mengoptimalkan kegiatan BDS dalam memfasilitasi pemberdayaan dan	1. Pelaku usaha dapat legalitas 2. Omset meningkat





	Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	pengembangan UMKM	
2.	Dicermati efektivitasnya monev program dan kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Cirebon	1. Pertemuan forum UMKM 2. Kemitraan usaha	Pelaku usaha dapat berdaya saing

